



Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten Karo)

**Regita Yolanda Br Sinulingga^{1*}, Muhammad Rizal², Khairunisa Harahap³
Kornelius Harefa⁴, Muhammad Ridha Habibi⁵**

¹²³⁴⁵Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan I.
Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara 20221

*Penulis Korespondensi: regitasinulingga17@gmail.com

Abstract. *This study is motivated by the persistence of errors and weaknesses in village fund management that may lead to fraud. The study is grounded in Stewardship Theory, which views village officials as stewards who are responsible for managing village funds in a trustworthy manner, oriented toward organizational and public interests, and upholding moral values and accountability. This study aims to analyze the effect of village officials' competence, organizational culture, and internal control systems on the prevention of fraud in village fund management, with morality as a moderating variable, based on an empirical study conducted in Karo Regency.*

This research employs a quantitative approach using a survey method targeting village officials in Karo Regency. The research population consists of 26 villages, with a sample of 78 village officials selected through purposive sampling. The data used are primary data collected through questionnaire distribution. Data analysis techniques include descriptive statistical analysis, measurement model testing (outer model), and structural model testing (inner model), with the data analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS) version 4.1.

The results indicate that the competence of village officials has a positive and significant effect on fraud prevention in village fund management, while organizational culture has no significant effect. The internal control system is also proven to have a positive and significant effect on fraud prevention in village fund management. Furthermore, morality is able to moderate the effect of village officials' competence and internal control systems on fraud prevention; however, it fails to moderate the relationship between organizational culture and fraud prevention in village fund management in Karo Regency. These findings suggest that fraud prevention does not solely depend on organizational culture and officials' morality, but also requires adequate competence of village officials and effective internal control systems

Keywords: *Village Officials' Competence; Organizational Culture; Internal Control System; Fraud Prevention; Morality*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kesalahan dan kelemahan dalam pengelolaan dana desa yang berpotensi menimbulkan fraud. Penelitian ini didasarkan pada Teori Stewardship, yang memandang aparatur desa sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola dana desa secara amanah, berorientasi pada kepentingan organisasi dan masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai moral dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, budaya organisasi, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi pada studi empiris di Kabupaten Karo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap aparatur desa di Kabupaten Karo. Populasi penelitian terdiri dari 26 desa, dengan sampel sebanyak 78 aparatur desa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data meliputi uji statistik deskriptif, uji model pengukuran (outer model), dan uji model struktural (inner model) dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS) versi 4.1.

Hasil penelitian (Rustiyaningsih, 2023) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa, sedangkan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan. Sistem pengendalian internal juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Selain itu, moralitas mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud, namun tidak mampu memoderasi pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa di Kabupaten Karo. Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan fraud tidak hanya bergantung pada budaya organisasi dan moralitas aparatur, tetapi juga memerlukan kompetensi aparatur desa yang memadai serta dukungan sistem pengendalian internal yang efektif.

Kata Kunci : Kompetensi Aparatur Desa; Budaya Organisasi; Sistem Pengendalian Internal; Pencegahan Fraud; Moralitas

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan secara mandiri. Namun, besarnya alokasi dana desa yang diterima setiap tahun tidak selalu diiringi dengan tata kelola yang memadai. Berbagai temuan empiris menunjukkan masih ditemukannya kesalahan dan kelemahan dalam pengelolaan dana desa yang berpotensi menimbulkan fraud, baik dalam bentuk penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, maupun rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan fraud dana desa bukan hanya bersifat individual, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem dan perilaku organisasi di pemerintahan desa.

Penelitian ini didasarkan pada Teori Stewardship, yang memandang aparatur desa sebagai pihak yang dipercaya (steward) untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab, berorientasi pada kepentingan organisasi dan masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Dalam perspektif ini, aparatur desa diharapkan tidak hanya bekerja berdasarkan kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk mencegah terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, pencegahan fraud sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa, budaya organisasi yang berlaku, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Namun demikian, faktor moralitas individu menjadi aspek penting yang dapat memperkuat atau justru melemahkan pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap upaya pencegahan fraud.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, budaya organisasi, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi pada studi empiris di Kabupaten Karo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap aparatur desa. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 78 aparatur desa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dari 26 desa. Analisis data dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, sedangkan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, moralitas mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud, namun tidak mampu memoderasi pengaruh budaya organisasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa tidak dapat hanya mengandalkan budaya organisasi dan moralitas aparatur, tetapi memerlukan dukungan nyata berupa peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan sistem pengendalian internal yang efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agent, di mana pendelegasian wewenang membuka peluang terjadinya konflik kepentingan. Ketidakeimbangan informasi (information asymmetry) menyebabkan principal tidak mampu memantau tindakan agent secara optimal, sehingga memicu agency conflict dan perilaku oportunistik. Dalam konteks pengelolaan dana desa, aparatur desa bertindak sebagai agent yang mengelola dana publik atas nama masyarakat sebagai principal. Lemahnya pengawasan, keterbatasan literasi keuangan masyarakat, serta rendahnya transparansi anggaran memperbesar risiko penyimpangan dan fraud. Oleh karena itu, penerapan mekanisme monitoring, transparansi, akuntabilitas, dan sistem insentif yang tepat menjadi instrumen penting untuk menekan konflik keagenan, meskipun praktiknya masih rentan terhadap moral hazard akibat lemahnya pengendalian dan integritas aparatur.

Selanjutnya, teori *stewardship* menekankan bahwa aparatur desa pada dasarnya memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan publik dan tujuan organisasi. Pendekatan ini memandang aparatur desa sebagai *steward* yang bertanggung jawab, jujur, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pencegahan fraud dalam perspektif *stewardship* akan lebih efektif apabila aparatur desa memiliki kompetensi yang memadai, bekerja dalam budaya organisasi yang menjunjung nilai etika, didukung sistem pengendalian internal yang baik, serta dilandasi moralitas yang tinggi. Dengan demikian, teori *stewardship* memberikan kerangka normatif yang menyeimbangkan pendekatan pengawasan dalam teori keagenan.

Penelitian ini menggunakan teori *Fraud Hexagon* yang dikembangkan oleh (George Voutsinas, 2019), yang mencakup enam elemen utama: *stimulus*, *capability*, *opportunity*, *rationalization*, *ego*, dan *collusion*. Model ini menegaskan bahwa fraud tidak hanya dipicu oleh tekanan dan kesempatan, tetapi juga kemampuan individu, pembenaran moral, keserakahan, serta kolusi yang bersifat sistematis. Dalam pengelolaan dana desa, lemahnya pengendalian internal, rendahnya kompetensi aparatur, dan hubungan kerja yang bersifat personal memperbesar peluang terjadinya fraud berbasis kolusi, sehingga teori *fraud hexagon* relevan sebagai kerangka analitis utama.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yang bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan kausal antara kompetensi aparatur desa, budaya organisasi, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, dengan moralitas sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran variabel secara objektif dan analisis hubungan antarvariabel menggunakan metode statistik yang terstruktur (Sugiyono, 2022).

a. Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh aparatur desa di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa. Mengingat jumlah populasi yang besar, penelitian ini menggunakan purposive sampling sesuai dengan kriteria tertentu (Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Sampel yang diperoleh sebanyak 78 aparatur desa yang berasal dari beberapa desa di enam kecamatan di Kabupaten Karo. Kriteria responden meliputi aparatur desa yang masih aktif menjabat, memiliki masa kerja minimal satu tahun, serta terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pelaporan pengelolaan dana desa. Penetapan kriteria ini bertujuan untuk memastikan responden memiliki pemahaman yang memadai sehingga data yang diperoleh relevan dan mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya.

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada aparatur desa sebagai responden. Instrumen disusun dengan mengadaptasi penelitian terdahulu yang relevan untuk mengukur kompetensi aparatur desa, budaya organisasi, sistem pengendalian internal, moralitas, dan pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Seluruh item pernyataan diukur menggunakan skala Likert, dan data yang diperoleh merupakan data primer karena dikumpulkan langsung dari responden. Analisis data menggunakan PLS-SEM dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.1, yang dipilih karena mampu menganalisis hubungan langsung dan moderasi antarvariabel laten serta sesuai untuk ukuran sampel yang relatif terbatas dan tanpa asumsi normalitas data. Prosedur analisis mengacu pada pedoman yang dikemukakan oleh A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Evaluasi model dilakukan melalui model pengukuran dan model struktural. Hasil pengujian menunjukkan seluruh indikator memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, sehingga layak digunakan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan bootstrapping untuk memperoleh koefisien jalur, nilai *t-statistic*, dan *p-value*. Model penelitian menempatkan kompetensi aparatur desa, budaya organisasi, dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen, pencegahan fraud sebagai variabel dependen, serta moralitas sebagai variabel moderasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Karo

Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di kawasan Pegunungan Bukit Barisan dengan ibu kota di Kabanjahe. Wilayah ini berada pada ketinggian sekitar 140–1.400 meter di atas permukaan laut, memiliki kondisi alam yang sejuk dan subur, sehingga sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Secara administratif, Kabupaten Karo terdiri dari 17 kecamatan, 259 desa, dan 10 kelurahan dengan luas wilayah sekitar 2.127,5 km². Berdasarkan data **Badan Pusat Statistik** tahun 2026, jumlah penduduk Kabupaten Karo tercatat sebanyak 437.547 jiwa. Mayoritas penduduk berasal dari suku Karo, dengan mata pencaharian yang beragam seperti petani, aparatur sipil negara, tenaga pendidik, anggota TNI/Polri, pedagang, dan pekerjaan lainnya.

2. Hasil Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Dalam menganalisis data menggunakan metode SEM-PLS, evaluasi model pengukuran (*outer model*) dilakukan dengan menilai beberapa kriteria, yaitu *reliability*, *convergent validity*, dan *discriminant validity*, untuk memastikan kualitas konstruk dalam penelitian (Hair et al., 2019; Cheung et al., 2023)

Hasil Uji Outer Loading Sebelum Eliminasi

Berdasarkan nilai *outer loading* sebelum dilakukan eliminasi terhadap indikator yang memiliki nilai $< 0,7$. Indikator dianggap layak untuk dipertahankan apabila nilai *outer loading factor* $> 0,7$.

Hasil Uji Outer Loading Setelah Eliminasi

Berdasarkan hasil awal pengujian *outer model*, terdapat beberapa indikator dengan nilai *outer loading* dibawah 0,7 bahkan kurang dari 0,6. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan penghapusan indikator tersebut. Menurut (Hair et al., 2014) indikator dengan nilai *outer loading* dibawah 0,6 sebaiknya dihapus karena tidak memenuhi validitas konvergen. Setelah indikator yang tidak memenuhi kriteria dieliminasi, dilakukan pengujian ulang terhadap model penelitian. Hasil pengujian ulang terhadap *convergent validity* disajikan sebagai berikut:

Hasil Uji Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)

Hasil dari pengujian validitas diskriminan disajikan dalam tabel dibawah ini.

Discriminant Validity Berdasarkan HTMT (Heterotrait-Monotrait-Ratio)

Variabel	KAD (X1)	BO (X2)	SPI (X3)	PKF (Y)	MO (Z)
Kompetensi Aparatur Desa (X1)					
Budaya Organisasi (X2)	0,488				
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,639	0,846			
Pencegahan Kecurangan Fraud (Y)	0,702	0,542	0,737		
Moralitas (Z)	0,321	0,668	0,660	0,568	

Discriminant Validity Berdasarkan Nilai *Cross Loading*

Indikator	KAD (X1)	BO (X2)	SPI (X3)	PKF (Y)	MO (Z)
Kompetensi Aparatur Desa 1.1	0.836	0.425	0.528	0.550	0.335
Kompetensi Aparatur Desa 1.2	0.874	0.407	0.494	0.484	0.324
Kompetensi Aparatur Desa 1.3	0.825	0.418	0.428	0.496	0.299
Kompetensi Aparatur Desa 1.4	0.737	0.314	0.348	0.458	0.155
Kompetensi Aparatur Desa 1.5	0.773	0.166	0.402	0.481	0.108
Budaya Organisasi 2.2	0.334	0.783	0.655	0.330	0.472
Budaya Organisasi 2.3	0.392	0.815	0.596	0.395	0.431
Budaya Organisasi 2.5	0.352	0.809	0.496	0.448	0.547
Budaya Organisasi 2.6	0.236	0.759	0.461	0.182	0.418
Sistem Pengendalian Internal 3.1	0.348	0.372	0.729	0.491	0.442

Sistem Pengendalian Internal 3.10	0.481	0.483	0.818	0.506	0.340
Sistem Pengendalian Internal 3.4	0.493	0.667	0.815	0.449	0.508
Sistem Pengendalian Internal 3.7	0.391	0.665	0.748	0.476	0.599
Sistem Pengendalian Internal 3.9	0.412	0.551	0.772	0.484	0.435
Pencegahan Kecurangan Fraud.3	0.426	0.497	0.479	0.770	0.359
Pencegahan Kecurangan Fraud.4	0.550	0.195	0.513	0.849	0.416
Pencegahan Kecurangan Fraud.5	0.459	0.512	0.511	0.736	0.389
Pencegahan Kecurangan Fraud.7	0.398	0.401	0.451	0.760	0.368
Pencegahan Kecurangan Fraud.8	0.543	0.280	0.489	0.814	0.522
Moralitas .1	0.241	0.536	0.480	0.440	0.879
Moralitas.2	0.215	0.456	0.465	0.402	0.889
Moralitas.3	0.200	0.468	0.484	0.379	0.922
Moralitas.4	0.321	0.581	0.599	0.561	0.923
Moralitas.5	0.361	0.643	0.622	0.552	0.916

Hasil Uji *Fornell-Larcker Criterion*

Variabel	KAD(X1)	BO(X2)	SPI(X3)	PKF(Y)	MO(Z)
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0.810				
Budaya Organisasi (X2)	0.431	0.792			
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0.547	0.701	0.777		
Pencegahan Kecurangan Fraud (Y)	0.611	0.462	0.621	0.787	

Moralitas (Z)	0.306	0.603	0.596	0.528	0.906
---------------	-------	-------	-------	-------	--------------

Hasil Uji Reliabilitas (Reliability)

Hasil Uji Reabilitas

Keterangan	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0.868	0.905	0.657
Budaya Organisasi (X2)	0.810	0.870	0.627
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0.835	0.884	0.604
Pencegahan Kecurangan Fraud Y)	0.847	0.890	0.619
Moralitas (Z)	0.946	0.958	0.821

Hasil Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Hasil Uji R-Square (R^2)

Menurut Hair et al.(2017), R-square merupakan indikator utama dalam evaluasi inner model, dimana R sebesar 0,75 dianggap substansial, 0,50 dianggap moderat, dan 0,25 dianggap lemah.

UJI R-Square (R^2)

Keterangan	R-square	R-square adjusted
Pencegahan Kecurangan Fraud (Y)	0.628	0.591

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai R-square adjusted untuk variabel pencegahan kecurangan *fraud* sebesar 0,628 atau 62,8% yang tergolong sedang dan

moderat dalam penelitian. Sedangkan sisanya sebesar 0,372 atau 37,2% diepengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Hasil Uji Predictive Relevance (Q^2)

Hasil Uji Predictive Relevance (Q^2)

Variabel	Q^2 predict
Pencegahan Kecurangan <i>Fraud</i> (Y)	0.449

Berdasarkan hasil pengujian Q-Square pada tabel 4.13 Q-Square memiliki nilai sebesar 0,449. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Q^2 pencegahan kecurangan *fraud* dianggap baik karena memiliki nilai diatas 0.

Multikolinearitas

Uji Multicollinearity ini adalah untuk menentukan multikolinieritas variabel dengan cara menilai korelasi antar variabel bebas. Uji Multicollinearity terpenuhi jika nilai VIF setiap variabel < 10 . Hal ini dapat dilihat sebagai berikut

Uji Multicollinearity

KETERANGAN	VIF
Kompetensi Aparatur Desa (X1) -> Pencegahan Kecurangan Fraud (Y)	1.542
Budaya Organisasi (X2) -> Pencegahan Kecurangan Fraud (Y)	2.348
Sistem Pengendalian Internal (X3) -> Pencegahan Kecurangan Fraud (Y)	3.101
Moralitas (Z) -> Pencegahan Kecurangan Fraud (Y)	1.786
Moralitas (Z) x Kompetensi Aparatur Desa (X1) -> Pencegahan Kecurangan Fraud (Y)	1.456
Moralitas (Z) x Budaya Organisasi(X2) -> Pencegahan Kecurangan Fraud (Y)	1.834

Moralitas (Z) x Sistem Pengendalian Internal (X3) -> Pencegahan Kecurangan Fraud (Y)	2.651
--	-------

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian terbebas dari masalah multikolinearitas dan layak untuk dilakukan pengujian hipotesis lebih lanjut .

Pengujian Hipotesis

Keterangan	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
PKF (X1) -> PKF(Y)	0.325	0.321	0.101	3.207	0.001
BO(X2) -> PKF(Y)	-0.012	0.033	0.144	0.081	0.468
SPI(X3) -> PKF(Y)	0.339	0.324	0.169	2.009	0.022
MO(Z) -> PKF(Y)	0.287	0.267	0.132	2.175	0.015
MO(Z) x KAD(X1) -> PKF(Y)	0.320	0.327	0.092	3.482	0
MO(Z) x BO(X2) -> PKF(Y)	0.135	0.136	0.139	0.974	0.165
MO(Z) x SPI(X3) -> PKF(Y)	-0.379	-0.373	0.154	0.2467	0.007

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa, dengan nilai koefisien sebesar 0,325, nilai T-statistik sebesar 3,207 ($>1,96$), serta P-values sebesar 0,001 ($<0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi aparatur desa yang tercermin dari pengetahuan teknis, keterampilan administrasi, serta pengalaman kerja dalam pengelolaan keuangan desa berkontribusi secara nyata dalam meminimalkan potensi terjadinya kecurangan. Temuan ini mendukung teori stewardship yang memandang aparatur desa sebagai steward yang akan bertindak demi kepentingan

publik apabila memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai. Kompetensi aparatur desa mendorong pengelolaan dana desa yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga risiko fraud dapat ditekan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Bernard et al.,2023) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa, dengan nilai koefisien sebesar $-0,012$, nilai T-statistik sebesar $0,081$ ($<1,96$), serta P-values sebesar $0,468$ ($>0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa nilai, norma, dan kebiasaan kerja yang berkembang dalam organisasi pemerintahan desa belum mampu secara langsung memengaruhi perilaku aparatur desa dalam mencegah kecurangan. Ketidaksignifikanan pengaruh budaya organisasi mengindikasikan bahwa budaya yang ada kemungkinan belum terinternalisasi secara konsisten dalam aktivitas pengelolaan dana desa. Dalam perspektif teori keagenan, lemahnya budaya organisasi dapat membuka peluang terjadinya perilaku oportunistik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Lianita et al.,2022) yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, dengan nilai koefisien sebesar $0,339$, nilai T-statistik sebesar $2,009$ ($>1,96$), serta P-values sebesar $0,022$ ($<0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, maka semakin efektif upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal yang efektif, seperti pemisahan fungsi, prosedur otorisasi transaksi, dokumentasi yang memadai, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala, mampu membatasi peluang terjadinya kecurangan. Dalam kerangka teori stewardship, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme pendukung

aparatur desa dalam menjalankan amanah publik secara tertib dan akuntabel. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Azalia et al., 2024).

4 Peran Moralitas dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Fraud

Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa moralitas mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud, dengan nilai koefisien interaksi sebesar 0,320, nilai T-statistik sebesar 3,482 ($>1,96$), serta P-values sebesar 0,000 ($<0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa akan semakin efektif dalam mencegah fraud apabila diiringi dengan tingkat moralitas yang tinggi. Dalam perspektif teori stewardship, aparatur desa yang memiliki kompetensi dan moralitas tinggi akan bertindak secara profesional dan berorientasi pada kepentingan publik. Moralitas berperan sebagai pengendali internal individu yang mengarahkan penggunaan kompetensi secara etis dan bertanggung jawab. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ego Muslim et al. (2025).

5 Peran Moralitas dalam Memoderasi Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud

Hasil pengujian menunjukkan bahwa moralitas tidak mampu memoderasi pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan fraud, dengan nilai koefisien sebesar 0,135, nilai T-statistik sebesar 0,974 ($<1,96$), serta P-values sebesar 0,165 ($>0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun aparatur desa memiliki moralitas individu yang relatif baik, budaya organisasi yang lemah dan tidak konsisten tetap tidak mampu mendorong perilaku pencegahan fraud secara optimal. Hasil ini mengindikasikan bahwa pencegahan fraud tidak dapat hanya bergantung pada moralitas individu, tetapi memerlukan internalisasi nilai dan norma organisasi yang kuat serta didukung oleh sistem pengendalian yang efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rustiyaningsih, 2023).

6 Peran Moralitas dalam Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud

Hasil pengujian menunjukkan bahwa moralitas mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dengan arah hubungan negatif, yang

ditunjukkan oleh nilai koefisien interaksi sebesar $-0,379$, nilai T-statistik sebesar $2,467$ ($>1,96$), serta P-values sebesar $0,007$ ($<0,05$). Arah hubungan negatif ini mengindikasikan bahwa pada tingkat moralitas aparatur desa yang tinggi, ketergantungan terhadap sistem pengendalian internal formal menjadi relatif lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa moralitas aparatur desa berperan sebagai bentuk pengendalian internal informal yang efektif. Dalam kerangka teori stewardship, aparatur desa yang memiliki integritas tinggi akan tetap bertindak jujur dan bertanggung jawab meskipun pengawasan formal tidak diterapkan secara ketat. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ego Muslim et al, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, budaya organisasi, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi(studi empiris pada kabupaten karo). Sampel penelitian ini terdiri dari 78 aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan perumusan masalah, pengujian hipotesis, serta hasil analisis data pada SmartPLS 4.1 , 2026 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kabupaten Karo
2. Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kabupaten Karo
3. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kabupaten Karo
4. Moralitas mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kabupaten Karo
5. Moralitas tidak mampu memoderasi pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kabupaten Karo
6. Moralitas mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kabupaten Karo

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini .
Maka penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya

1. Bagi Aparatur Desa di Kabupaten Karo

Aparatur desa di Kabupaten Karo diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap regulasi pengelolaan dana desa melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan. Selain itu, aparatur desa perlu menumbuhkan kesadaran moral dan integritas pribadi dalam menjalankan tugas, sehingga pencegahan *fraud* tidak hanya bergantung pada mekanisme pengendalian formal, tetapi juga pada kesadaran etis sebagai pengelola dana publik

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek dan jumlah responden agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik. Selain itu, peneliti dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain yang relevan, seperti kepemimpinan, partisipasi masyarakat, tekanan anggaran, atau pemanfaatan teknologi informasi, serta menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif

3. Bagi Akademisi

Akademisi diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengujian dan pengembangan teori, seperti teori *stewardship* dan *fraud hexagon* ,serta memperkaya literatur empiris mengenai tata kelola keuangan desa yang berorientasi pada akuntabilitas dan integritas.

DAFTAR REFERENSI

Situmeang, B. J. M., Simanjuntak, R., & Lolo, T. S. A. (2023). *Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan moral sensitivity terhadap*

- pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5(2), 2414–2422. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13583>
- Apriliyani, L., & Kholis, N. (2023). Pengaruh kompetensi, akuntabilitas, dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(3), 58–77. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i3.178>
- Cheung, S. K., Pomerantz, E. M., & Li, J. (2023). Assessing construct validity in PLS–SEM: A critical review and recommendations. *Journal of Business Research*, 164, 113838. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113838>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/a-primer-on-partial-least-squares-structural-equation-modeling-pls-sem/book246369>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Juniarti, M., Hartanti, S., & Nurhasanah, N. (2024). Pengaruh kompetensi, akuntabilitas, moralitas perangkat desa terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa Kecamatan Lubuk Keliat. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 4555–4572. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17029>
- Puspita, N. K. M. C., & Ratnadi, N. M. D. (2023). Kompetensi, sistem pengendalian internal, locus of control, dan pencegahan fraud pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 346–359. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i02.p05>
- Rahmadani, A. P., Nugroho, G. W., & Martaseli, E. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, whistleblowing, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah*

Akuntansi dan Teknologi, 15(2), 34–47.
<https://doi.org/10.31253/aktek.v15i2.2244>

Situmeang, B. J. M., Simanjuntak, R., & Lolo, T. S. A. (2023). Pengaruh kompetensi aparaturnya desa, sistem pengendalian internal, dan moral sensitivity terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2414–2422.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13583>

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Vousinas, G. (2019). Fraud hexagon: An extension of the fraud triangle and fraud diamond. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 11(2), 25–44.
<https://www.nacva.com/content/34-current-year>

Yolanda, O. (2025). Pengaruh kompetensi aparaturnya desa dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pada pengelolaan dana desa. *JAA – Jurnal Akuntansi Aisyah*, 6(1), 1–6.
<https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/JAA/article/view/1899>